

PROSPEK SOSIALISME-RELIGIUS DI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Pendahuluan

Sosialisme religius, baik sebagai istilah maupun sebagai ide, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, khususnya di Indonesia. Sudah semenjak masa perkembangan Sarikat Islam, khususnya setelah mengalami sentuhan dengan paham-paham sosialis-komunis Barat yang mengadakan infiltrasi ke dalam tubuhnya, ide sosialisme-religius itu mulai mendapatkan perumusan-perumusan sistematis dan serius, meskipun mungkin belum sepenuhnya memuaskan. H.O.S. Cokroaminoto menulis buku berjudul *Islam dan Sosialisme*, dan H. Agus Salim mengemukakan pikiran bahwa ide sosialisme sudah tercakup dalam ajaran-ajaran agama, khususnya agama Islam. Syafruddin Prawiranegara pernah pula menulis sebuah buku pamflet yang isinya menegaskan bahwa seorang Muslim haruslah sekaligus seorang sosialis. Karena pikiran-pikiran serupa itu, tidak mengherankan, jika Masyumi, oleh Kahin, digolongkan sebagai “Islam Kiri”, atau “Islam Sosialis”.

Tetapi, istilah “Sosialisme Religius” bukanlah monopoli golongan atau tokoh khususnya Islam saja. Bung Karno sendiri tidak sekali-dua kali memberi penegasan bahwa masyarakat yang dicita-citakannya adalah suatu masyarakat sosialis-religius. Sebab, untuk bangsa Indonesia, dasar Pancasila merupakan faktor pemberi warna dan corak utama kepada setiap gagasan politik atau sosial

yang tumbuh di atas buminya. Dan ide sosialisme religius itu memperoleh artikulasinya yang penuh melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah Ruslan Abdul Gani.

Di luar negeri, ide sosialisme-religius juga bukan suatu barang aneh. Hampir semua negeri Islam, terutama yang biasa digolongkan sebagai radikal seperti Aljazair, Lybia, Mesir, Syria, Irak, dan lain-lain, menganut sistem sosialisme Arab, kadang-kadang juga dinamakan sosialisme Islam. Dan Pakistan, yang memang memiliki Islam sebagai *raison d'être*-nya, menjadikan sosialisme Islam sebagai suatu pilihan sistem kemasyarakatannya, sekalipun istilah itu memperoleh penonjolan hanya pada masa kuasanya Ali Bhuto.

Adalah suatu hal yang cukup menarik bahwa di dunia Barat pun tumbuh subur pikiran sosialis-religius. Misalnya, di Jerman Barat terdapat partai Uni Sosial Kristen (CSU), kawan berkoalisi Uni Demokrat Kristen (CDU), yang punya cita-cita melaksanakan masyarakat berkeadilan sosial dengan dijiwai ajaran-ajaran Kristen, khususnya Katolik. Bahkan partai SPD (Sosial Demokrat Jerman) yang “sekular” itu pun telah “merevisi” Marxismenya sehingga tidak lagi bersifat doktriner dan kaku, dengan jalan memasukkan unsur keagamaan ke dalam sistem ideologinya. Kita ketahui, berkat revisionisme Willy Eichler ini, SPD mampu memperluas basis massanya sehingga berhasil memenangkan beberapa kali pemilu di Jerman dan mejadikannya pemegang pemerintahan (bersama dengan Partai Demokrat Bebas—FDP).

Segi menarik dari apa yang terdapat di Barat itu ialah selamanya sosialisme, dengan sendirinya, dianggap alternatif terhadap kapitalisme, khususnya kapitalisme modern. Padahal, suatu tesis oleh Weber, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terbantah, mengatakan bahwa dorongan pertama tumbuhnya kapitalisme modern itu adalah etika Kristen Protestan, khususnya mazhab Calvin. Kenyataan itu menunjukkan bahwa tampaknya pikiran-pikiran yang ada di balik istilah-istilah tersebut, baik sosialisme maupun religiusitas, adalah cukup *fluid* atau “cair”, sehingga mudah

memperoleh bentuk sesuai dengan keinginan si manusia pelaku pikiran-pikiran itu sendiri.

Bertitik tolak dari latar belakang pengetahuan sekadarnya itu, kita hendak mencoba berbicara dan mendiskusikan prospek sosialisme religius di Indonesia.

Prospek Sosialisme

Pertanyaan: mengapa sosialisme, dalam konteks Indonesia, mungkin tidak perlu lagi diajukan? Sebab sosialisme dapat dianggap sebagai suatu cara lain untuk mengungkapkan ciri masyarakat yang dicita-citakan oleh Pancasila, yaitu masyarakat berkeadilan sosial. Keadilan sosial itulah, jika ditilik dari susunan Pancasila, yang merupakan tujuan kita bernegara.

Dalam konteks dunia (mondial, global), pertanyaan di atas juga dirasa semakin tidak terlalu penting. Sebab, meskipun menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda, umat manusia tampaknya menunjukkan kecenderungan yang bertambah kuat untuk menemukan jalan keluar, atau alternatif, terhadap jalan buntu kapitalisme yang kini, sebagai sistem kemasyarakatan, sedang mendominasi dunia. Jika tak secara langsung menggunakan istilah sosialisme, kecenderungan itu dapat ditemukan pada semakin gencarnya kampanye penyelenggaraan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dan akhir-akhir ini pemikiran yang semakin serius memperoleh pernyataannya dalam ide-ide “*zero growth movement*” dan tekanan pada segi-segi nilai kehidupan (*quality of life*), sebagaimana diartikulasikan oleh “Club of Rome”, misalnya.

Malahan, seakan terdengar sebagai suatu keanehan, negeri-negeri Barat yang lazimnya dianggap sebagai *bastion* kapitalisme (Eropa Barat), saat ini justru memperlihatkan gejala semakin tegas memilih politik dan pemerintahan yang lebih sosialis. Pemerintahan oleh SPD + FDP di Jerman Barat, oleh para Partai Buruh di Negeri Belanda, oleh partai-partai Sosial Demokrat di negeri-

negeri Skandinavia, dan lain-lain, merupakan bukti nyata untuk gejala tersebut. Dan jika pemerataan pendapatan, jaminan sosial serta kesempatan kerja merupakan indikasi-indikasi mencolok bagi adanya sosialisme, maka negeri-negeri Barat itu justru berada dalam kedudukan lebih maju daripada kebanyakan negara (berkembang) yang mengaku menganut paham sosialisme atau prinsip keadilan sosial. Jika *toh* negeri-negeri Barat itu sampai saat ini masih harus disebut negeri-negeri kapitalis, hal itu karena adanya dikotomi Timur-Barat (Amerika/Eropa Barat-Uni Sovyet/Eropa Timur/RRC), selain karena sifat-sifat dasar yang melekat erat pada sistem masyarakat mereka, seperti individualisme, *laissezfaire*, dan lain-lain. Juga karena pola hubungan yang mereka bentuk antarmereka dan negara-negara berkembang, (ingat dialog Utara-Selatan, misalnya). Walaupun demikian, di luar negeri-negeri komunis, beberapa negeri Eropa itu, khususnya negeri-negeri Skandinavia, *toh* tetap merupakan contoh yang amat baik bagi pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan sosial secara demokratis dan damai.

Mengapa Religius?

Barangkali yang lebih serius ialah persoalan: mengapa religius? Mungkin saja hal itu semata-mata karena pertimbangan pragmatis. Misalnya, karena bangsa Indonesia adalah bangsa religius (seperti sering dikliskan orang), atau karena pengalaman traumatis kita tentang PKI (mungkin juga PSI), kemudian kita hendak memagari dan memberi batas pada arus yang bisa menyimpangkan kita dari garis kesepakatan nasional (sebutlah: Orde Baru, Pancasila, dan lain-lain).

Tetapi, digunakannya predikat religius dapat dicari dasar pembenarannya yang lebih prinsipal. Misalnya, karena religius akan memberi dimensi yang lebih mendalam kepada cita-cita sosialisme. Bung Karno selalu mengatakan bahwa Pancasila adalah “*hogereoptrekking*” dari “*Declaration of Independence*”-nya Thomas

Jefferson dan “Manifesto Komunis”-nya Marx dan Engels. Terhadap yang pertama, Pancasila mempunyai kelebihan sosialisme, dan terhadap yang kedua, ketuhanan Yang Mahaesa.

Dimensi lebih mendalam dari sosialisme religius ialah dikuatkannya dasar moral cita-cita tersebut menjadi tidak hanya karena dorongan hendak berkehidupan yang lebih bahagia di dunia saja, tetapi juga dalam kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Sosialisme menjadi tidak hanya merupakan komitmen kemanusiaan, tetapi juga ketuhanan. Bung Hatta, dalam menerangkan bentuk kesalinghubungan antarsila dalam Pancasila, senantiasa menegaskan bahwa sila ketuhanan merupakan sila yang menyinari sila-sila lainnya, merupakan dasar moral yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kenegaraan dan kemasyarakatan kita.

Karena dasar moral yang kuat itu, sosialisme kita diharapkan tidak mudah terjerumus ke dalam lembah metode kerja “tujuan menghalalkan cara” sebagaimana diderita oleh gerakan-gerakan sosialis atau komunis radikal. Bagaimanapun, mungkin sulit diingkari bahwa gerakan komunis dan sosialis yang ada di dunia, semenjak abad yang lalu, khususnya yang memperoleh kejelasan filsafat dan rumusan oleh Marx, kemudian Lenin, Mao, dan lain-lain, merupakan gerakan kemanusiaan yang paling serius, sungguh-sungguh, dan spektakuler yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Tidak pernah sebelumnya sejarah menyaksikan sekelompok orang sedemikian sungguh-sungguh dan ambisius dalam perjuangan melaksanakan cita-cita kemanusiaan dan keadilan seperti golongan-golongan komunis dan sosialis, serta tingkat sofistikasi, baik segi ajaran maupun metode dan pengorganisasian yang demikian tingginya. Tetapi, sungguh suatu ironi, umat manusia dan sejarah juga rasanya belum pernah menyaksikan tindakan perkosaan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan spektakuler yang dilakukan oleh orang-orang komunis, khususnya kaum Bolsyewis di Rusia di bawah pimpinan Stalin. Segi ironis yang dimaksud ialah, bahwa pelaksanaan suatu cita-cita kemanusiaan yang paling tulus

dan spektakuler telah terjadi dengan menggunakan metode anti kemanusiaan yang paling rapi dan spektakuler pula.

Keadaan yang mencolok, paradoksal, malah kontradiktif, itulah yang menyebabkan Albert Camus, seorang filsuf sosialis-komunis muda asal Perancis/Aljazair yang amat fanatik, akhirnya, mengalami situasi tak mengerti, kemudian putus asa. Camus-lah yang kemudian mengajarkan, sebagai hasil penyimpulannya dari ironi-ironi yang dialami atau disaksikan, bahwa hidup ini adalah “*absurd*”, tak bisa dimengerti, malah tak berguna: hidup dan mati sama saja, dan tak ada faedahnya memikirkan persoalan-persoalan hidup ini. Baginya, sia-sia memikirkan masa lampau, dan *muspra* pula merenungkan masa depan. Yang penting ialah kini dan di sini. (*All that was is no more, and all that will be is not yet indeed, the cull justifies the means!*).

Mengapa gerakan kemanusiaan komunis-sosialis sampai terperosok ke dalam “*killground*”-nya metode yang meniadakan seluruh ciri dan watak kemanusiaan filsafat ajaran mereka itu? Kiranya mudah ditemukan sebabnya, yaitu, karena mereka menganut filsafat hidup dan pandangan dunia (kosmologi) yang mengingkari adanya alam bukan-materi (alam gaib), lebih-lebih mengingkari adanya Tuhan. Menurut Huston Smith, pengingkaran adanya alam gaib, khususnya Tuhan, adalah permulaan meluncurnya seseorang atau masyarakat ke amoralisme atau immoralisme. Sebab, kembali kepada Bung Hatta, hanya kepercayaan kepada Tuhan sajalah yang akan memberi kedalaman rasa tanggung jawab dan moralitas kepada tindak-tanduk manusia di dunia ini. Dengan adanya kepercayaan itu, seorang manusia bertindak tidak semata-mata karena perhitungan hasil dan akibatnya di dunia ini saja, tetapi, lebih penting lagi, di alam kehidupan yang lebih kekal kelak. Dasar tanggung jawab yang mendalam itu akan merupakan jaminan yang jauh lebih baik bagi kesejatan pelaksanaan suatu cita-cita, khususnya cita-cita kemanusiaan seperti sosialisme atau masyarakat berkeadilan sosial.

Keharusan Sosialisme di Indonesia

Maka dari itu, tidak dapat dihindari adanya keharusan bagi pelaksanaan sosialisme di Indonesia untuk mencari sumber-sumber motivasi dan dasar-dasar justifikasi yang ada dalam agama, dan menjadikan kegiatan pelaksanaannya sebagai suatu investasi untuk akhirat. Sumber-sumber itu didapatkan dalam konsep-konsep agama mengenai alam (*world outlook, weltanschauung*, kosmologi), mengenai manusia (*human outlook*), dan mengenai benda-benda ekonomi. Sebagai suatu *ancer-ancer (tentative)* dikemukakan prinsip-prinsip dalam agama Islam (agama bagian terbesar rakyat Indonesia) yang secara langsung ada kaitannya dengan jiwa dan semangat sosialisme:

1. Seluruh alam raya ini beserta isinya adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik mutlak segala yang ada.
2. Benda-benda ekonomi adalah milik Tuhan (dengan sendirinya), yang kemudian dititipkan kepada manusia (kekayaan sebagai amanat).
3. Penerima amanat harus memperlakukan benda-benda itu sesuai dengan “kemauan” Sang Pemberi Amanat (Tuhan), yaitu hendaknya “diinfakkan” menurut “jalan Allah”.
4. Kesempatan manusia memperoleh kehormatan amanat Allah itu (yaitu, mengumpulkan kekayaan) haruslah didapatkan dengan cara yang bersih dan jujur (halal).
5. Harta yang halal itu setiap tahun dibersihkan dengan zakat.
6. Penerima amanat harta tidak berhak menggunakan (untuk diri sendiri) harta itu semaunya, melainkan harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum (tidak kikir dan juga tidak boros, melainkan berada di antara keduanya).
7. Orang miskin mempunyai hak yang pasti dalam harta orang-orang kaya.

8. Dalam keadaan tertentu, kaum miskin berhak “merebut” hak mereka itu dari orang-orang kaya, jika pihak kedua ingkar.
9. Kejahatan tertinggi terhadap kemanusiaan ialah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberi fungsi sosial.
10. Cara memperoleh kekayaan yang paling jahat ialah “riba” atau “*exploitation de l’homme par l’homme*”.
11. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum menyosialisasikan harta yang dicintainya.
12. Dan lain-lain.

Sudah tentu prinsip-prinsip tersebut tidak selamanya memperoleh pelaksanaan secara harfiah, dan memang tidak harus demikian. Tetapi jelas, prinsip-prinsip tersebut terhujam dalam sekali pada agama Islam, termuat dengan tegas dalam al-Qur’an. Dan dapat dipastikan bahwa agama-agama yang lain juga memuat semangat yang sama.

Sejarah dan Pengalaman

Dimensi waktu dari amalan dan kegiatan manusia mengharuskan kita melihat dan mempelajari perjalanan sejarah dan pengalaman orang lain. Maka tidak mungkin bagi kita, rakyat Indonesia, melaksanakan cita-cita keadilan sosial secara isolatif, terlepas dari konteks global dan universalnya.

Telah disebut-sebut, komunisme merupakan gerakan mewujudkan keadilan sosial yang memperoleh kritik prinsipal dari sejarah, melalui para pemikir dan ahli filsafat. Demikian pula sosialisme di Barat yang tidak mampu secara fundamental menghilangkan ciri-ciri kapitalistis masyarakat di sana.

Kini timbul banyak gerakan di dunia, lokal, nasional, dan internasional, yang hendak mencoba menawarkan pikiran-pikiran yang lebih baik bagi pelaksanaan cita-cita kemanusiaan itu. Untuk sekadar contoh, di sini akan dikemukakan pokok-pokok

pikiran yang relatif paling mutakhir tentang masyarakat ideal yang dikehendaki. Contoh ini ialah sebagaimana termuat dalam buku *Moving Toward a New Society*, oleh Susanne Gowan dan kawan-kawan dari organisasi *Movement for a New Society* (MTNS), Philadelphia, USA. Bagi mereka, ciri-ciri masyarakat sehat ialah:

1. Physical Security.
2. Equality.
3. Non-exploitation.
4. Work.
5. Democracy.
6. Wholeness.
7. Community.
8. Freedom.
9. Conflict.
10. Ecological Harmony.
11. World Community.

Walaupun sesungguhnya setiap gerakan sosialis mempunyai dimensi mondial atau universal, namun yang telah terjadi dalam kenyataan ialah usaha mewujudkan sosialisme itu dalam satu negara (*socialism in one country* — Lenin). Bahkan dalam dunia komunis itu — yang notabene adalah yang paling *international minded* — sekarang justru menggejala dengan hebat tumbuhnya politik komunis nasional, seperti Yugoslavia (pelopornya) dan Vietnam. Mengenai Vietnam ini, ada pula yang menggolongkannya sebagai bentuk komunisme maju atau “*advanced communism/ socialism*”. Oleh karena itu, selalu ada kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk menemukan dan menempuh jalan sendiri ke arah terwujudnya keadilan sosial yang berciri khas Indonesia, sehingga karena itu paling cocok dan efektif untuk konteks Indonesia.

Memikirkan dan menemukan segi-segi praktis pelaksanaan suatu gagasan atau ide sering tidak segampang memahami prinsip-prinsip ide tersebut. Sebab, hal itu tidak saja menyangkut persoalan

komitmen dan tekad, tetapi juga mengait segi ketelitian, keahlian dan ketekunan. Inilah tantangan kita semua! [❖]